



NO. 5, JANUARI 2021

# POLICY BRIEF

Tim Pakar Percepatan Penanganan Covid-19  
Universitas Lambung Mangkurat

<https://covid19.ulm.ac.id>

## LANGKAH STRATEGIS ANTISIPASI PENINGKATAN LAJU PENYEBARAN COVID- 19 PADA TAHUN 2021 DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**DEWI ANGGRAINI\***

### Pendahuluan

Peningkatan jumlah kasus Covid 19 di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) masih harus tetap diwaspadai terutama dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di akhir Tahun 2020. Policy brief ini akan memberikan beberapa rekomendasi langkah strategis antisipasi peningkatan laju penyebaran Covid 19 pada Tahun 2021. Langkah strategis ini direkomendasikan berdasarkan pada beberapa kajian empiris yang telah dilakukan dan dipublikasikan.

### Kajian Empiris

Berdasarkan informasi peta zonasi risiko penyebaran Covid 19 di Indonesia per tanggal 27 Desember 2020, status zonasi risiko penyebaran Covid 19 di setiap kota/kabupaten di Provinsi Kalsel diberikan pada Tabel 1 berikut:

### RINGKASAN KEBIJAKAN

Langkah strategis antisipasi peningkatan laju penyebaran Covid 19 pada Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya: (1) mempertimbangkan peta zonasi risiko penyebaran Covid 19 di daerah sebelum pemberian izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka; (2) menunda pembukaan sekolah dengan sistem pembelajaran tatap muka sampai risiko penyebaran Covid 19 di daerah rendah atau tidak ada kasus; (3) memberikan informasi dan bimbingan kepada orangtua terkait proses pendampingan anak selama mengikuti pembelajaran jarak jauh; (4) memberikan informasi dan bimbingan kepada orangtua terkait proses pengawasan ketat terhadap perubahan perilaku dan deteksi dini gejala Covid 19 pada anak dan keluarganya (jika melakukan pembelajaran tatap muka); (5) meningkatkan capaian jumlah testing (spesimen) minimum, yaitu sebesar 1/1.000 penduduk per minggu, untuk setiap kota/kabupaten; (6) meningkatkan kualitas proses monitoring, evaluasi dan validasi terhadap pencatatan serta penginputan data hasil testing, tracing dan treatment secara terintegrasi ke dalam New All Record (NAR); (7) menggunakan sistem pelacakan kontak erat berbasis teknologi; (8) melakukan komunikasi dua arah yang baik antara pemerintah dengan para pelaku kegiatan ekonomi; (9) penegakan hukum, ketegasan, dan disiplin secara ketat dengan melibatkan para pemuka agama dan tokoh masyarakat; (10) memberikan himbauan kepada masyarakat untuk bersosial media dengan konten yang lebih mendidik, memotivasi dan mengingatkan untuk tidak melakukan mobilitas yang tinggi (jika tidak mendesak); (11) menghimbau para pemimpin daerah, instansi/unit, pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk dapat memberikan suri tauladan yang baik dalam menerapkan protokol kesehatan; dan (12) mengenali karakteristik dan budaya masyarakat lokal dalam melakukan pendekatan dan komunikasi.

*\*Dewi Anggraini, S.Si., M.App.Sci., Ph.D*

*Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan  
Alam (FMIPA), Universitas Lambung Mangkurat  
Email: dewi.anggraini@ulm.ac.id*

**Tabel 1.** Status Zona Risiko Penyebaran Covid-19

Kota/Kabupaten	Status
Tanah Laut	Risiko Tinggi
Kotabaru	Risiko Sedang
Banjarn	Risiko Sedang
Barito Kuala	Risiko Sedang
Tapin	Risiko Sedang
Hulu Sungai Selatan	Risiko Sedang
Hulu Sungai Tengah	Risiko Sedang
Hulu Sungai Utara	Risiko Sedang
Tabalong	Risiko Sedang
Tanah Bumbu	Risiko Sedang
Balangan	Risiko Sedang
Kota Banjarmasin	Risiko Sedang
Kota Banjarbaru	Risiko Sedang

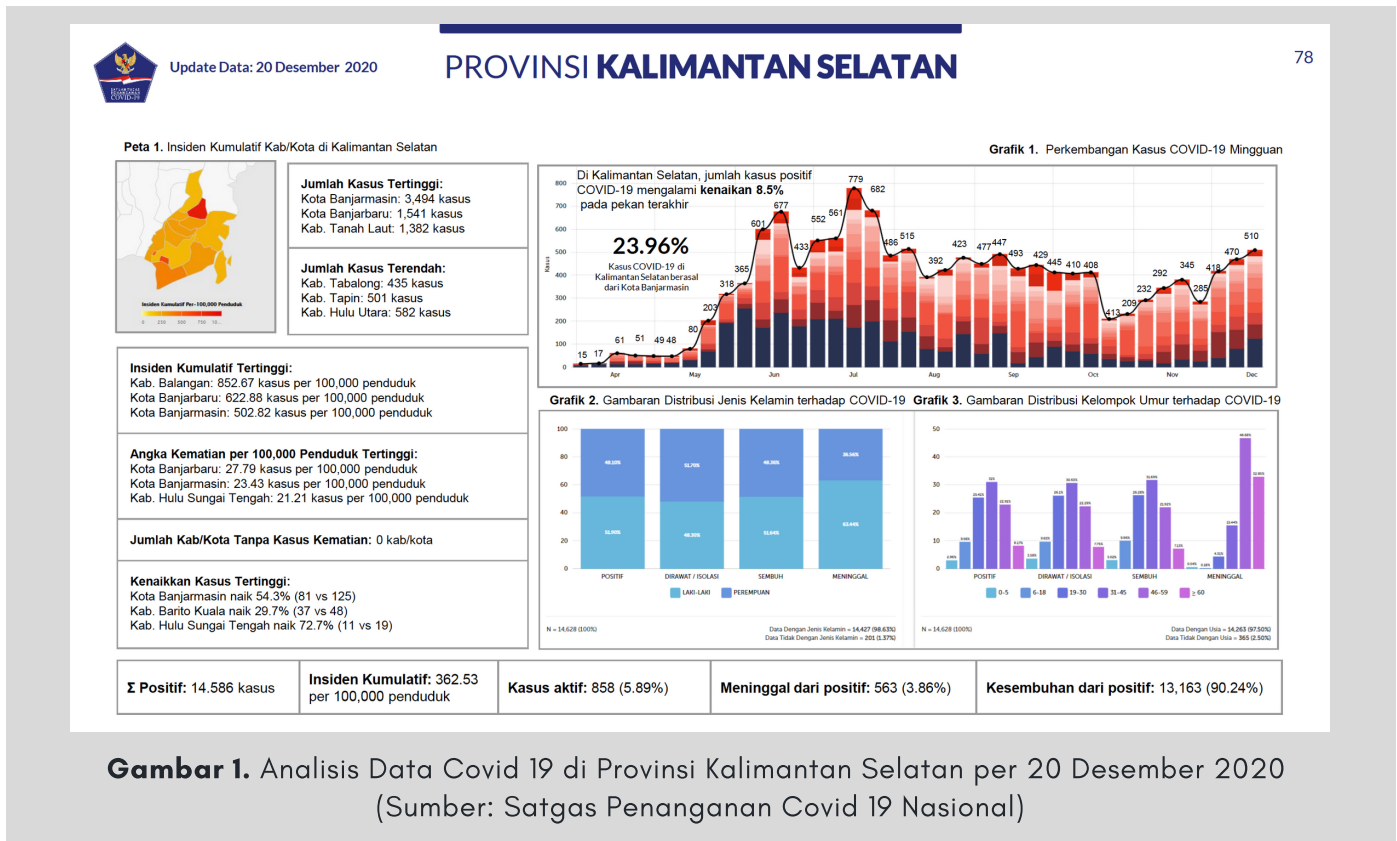
(Sumber: Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), <https://covid19.go.id/peta-risiko>)

Berdasarkan Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa, secara rata-rata, risiko penularan Covid 19 di Provinsi Kalsel masih harus tetap diwaspadai. Hal ini dikarenakan masih terdapat 12 kota/kabupaten yang masuk ke dalam zona risiko sedang dan 1 kabupaten masih berada di zona risiko tinggi. Penetapan zona risiko daerah ini dihitung berdasarkan tiga indikator kesehatan masyarakat, yaitu epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan dengan menggunakan skoring dan

pembobotan. Setiap indikator ditentukan berdasarkan beberapa kriteria. Oleh karena kriteria-kriteria dari setiap indikator kesehatan masyarakat menjadi penentu dalam perhitungan skor dan bobot zonasi risiko penyebaran Covid 19 di suatu daerah, maka ketersediaan dan integrasi "real" data yang akurat, tanpa ada konflik kepentingan, merupakan faktor utama untuk dapat menjamin validitas dan reliabilitas navigasi zonasi risiko daerah.

Berdasarkan laporan dari Satuan Tugas (Satgas) Covid 19 Nasional per tanggal 20 Desember 2020, rata-rata jumlah kasus positif Covid 19 di Provinsi Kalsel telah mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu sebesar 8,5%. Kota Banjarmasin merupakan penyumbang jumlah kasus Covid 19 tertinggi (3.494 kasus atau sekitar 23,96%), diikuti oleh Kota Banjarbaru (1.541 kasus), dan Kabupaten Tanah Laut (1.382). Kota Banjarmasin juga merupakan penyumbang kenaikan kasus Covid 19 tertinggi, yaitu sebesar 54,3% (Gambar 1).

Peningkatan kasus Covid 19 di Provinsi Kalsel ini sangat erat kaitannya dengan tingkat mobilitas penduduk yang cenderung meningkat di akhir Tahun 2020, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2021 (Muttuqin, 2020). Mobilitas atau



**Gambar 1.** Analisis Data Covid 19 di Provinsi Kalimantan Selatan per 20 Desember 2020 (Sumber: Satgas Penanganan Covid 19 Nasional)

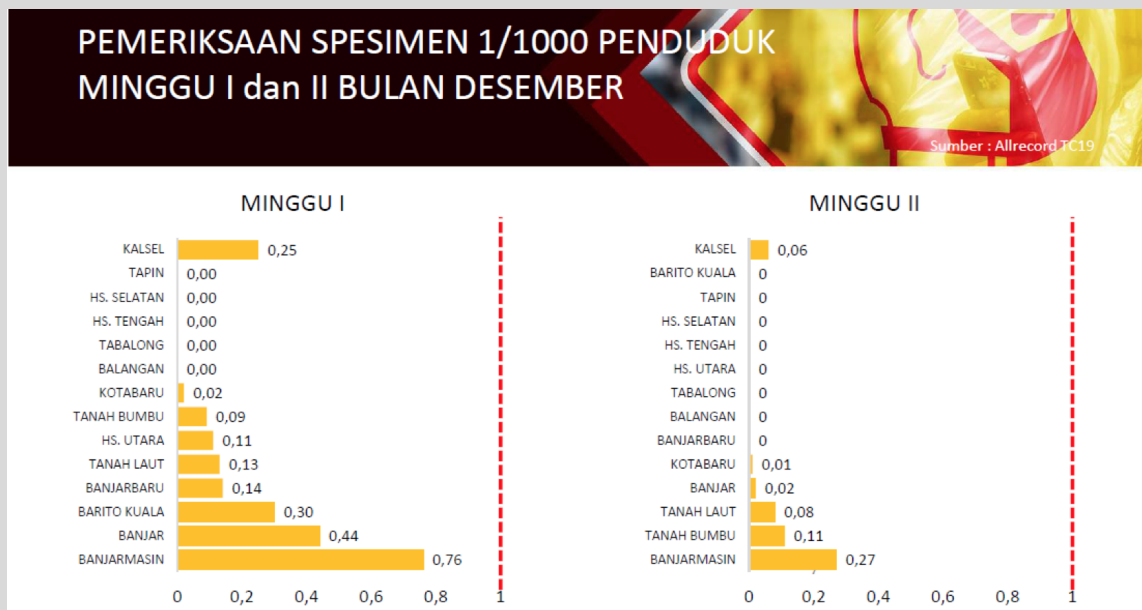
pergerakan penduduk yang dilakukan baik secara lokal (di dalam satu kota/kabupaten), antar daerah (lintas kota/kabupaten dalam satu provinsi), nasional (lintas provinsi), maupun internasional (lintas negara) berpotensi menghasilkan kasus impor yang selanjutnya melalui transmisi lokal dapat berpotensi menjadi kluster keluarga, sekolah dan perkantoran.

Berdasarkan data Covid 19 Community Mobility Reports, mobilitas penduduk di Provinsi Kalsel meningkat sejak pertengahan Tahun 2020 (Muttaqin, 2020). Peningkatan tersebut dipicu oleh momen mudik lebaran pada akhir bulan Mei, liburan sekolah dan adanya kebijakan adaptasi kebiasaan baru. Kemudian, mobilitas penduduk kembali melonjak pada liburan di akhir bulan Oktober dan sejak pertengahan bulan Desember. Tren mobilitas penduduk lokal ini sejalan dengan trend mobilitas penduduk di tingkat nasional.

Berdasarkan kriteria dari World Health Organization (WHO), pandemi Covid 19 dapat dikatakan terkendali jika angka positivity rate kurang dari 5% dalam waktu dua minggu secara berturut-turut. WHO juga menetapkan standar jumlah tes Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) yang dilakukan minimal 1% dari jumlah penduduk per minggu atau 1 per 1.000 penduduk per minggu. Berdasarkan data

hasil proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, jumlah penduduk Provinsi Kalsel pada Tahun 2020 adalah kurang lebih 3.642.640 jiwa (BPS Provinsi Kalsel, 2020).

Dengan berpedoman pada standar WHO, maka Provinsi Kalsel diharapkan dapat melakukan tes minimal sebanyak 36.426 spesimen per minggu. Jika berdasarkan jumlah penduduk setiap kota/kabupaten, maka jumlah minimal alokasi tes per minggu adalah kurang lebih sebagai berikut: Banjarmasin (6.282 spesimen), Tanah Bumbu (2.696 spesimen), Balangan (1.128 spesimen), Hulu Sungai Tengah (2.441 spesimen), Banjarbaru (2.012 spesimen), Tanah Laut (2.978 spesimen), Tabalong (2.197 spesimen), Barito Kuala (2.771 spesimen), Hulu Sungai Selatan (2.131 spesimen), Tapin (1.686 spesimen), Hulu Sungai Utara (2.098 spesimen), Kotabaru (2.915 spesimen), dan Banjar (5.091 spesimen) (Anggraini, 2020). Jika jumlah penduduk yang dites RT-PCR tidak mencapai kriteria 1 per 1.000 penduduk per minggu, maka data yang dihasilkan cenderung bias (Muttaqin, 2020). Hal ini dapat diartikan bahwa jika terjadi penurunan kasus Covid 19 karena kurangnya jumlah tes RT-PCR yang dilakukan, maka secara statistik belum cukup bukti untuk dapat menyatakan bahwa penurunan tersebut signifikan atau nyata.



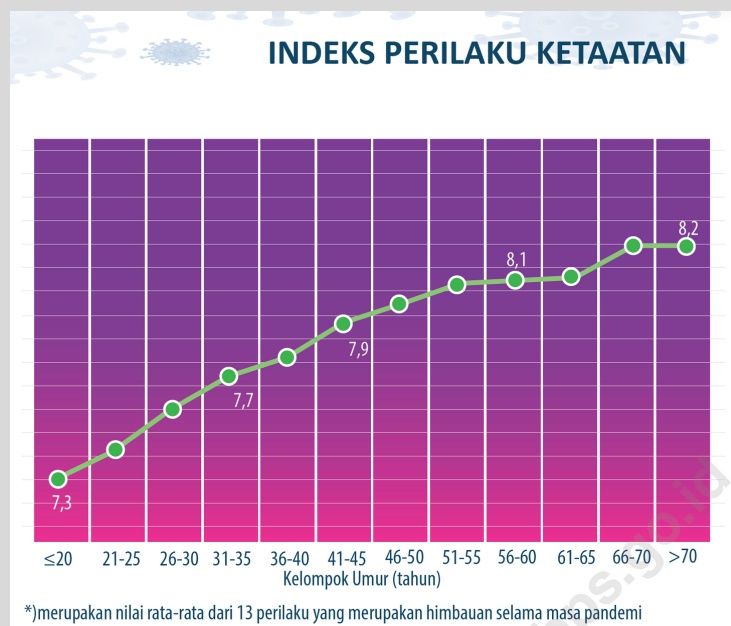
**Gambar 2.** Persentase Jumlah Tes RT-PCR di Provinsi Kalimantan Selatan per 16 Desember 2020 (Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan)

Berdasarkan Gambar 2, dapat disimpulkan bahwa jumlah tes RT-PCR yang dilakukan di setiap kota/kabupaten di Provinsi Kalsel masih belum memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh WHO (< 1% per minggu). Hal ini mengakibatkan perlunya kehati-hatian pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten dalam menginterpretasikan hasil analisis data untuk membuat keputusan maupun kebijakan terkait penanggulangan Covid 19.

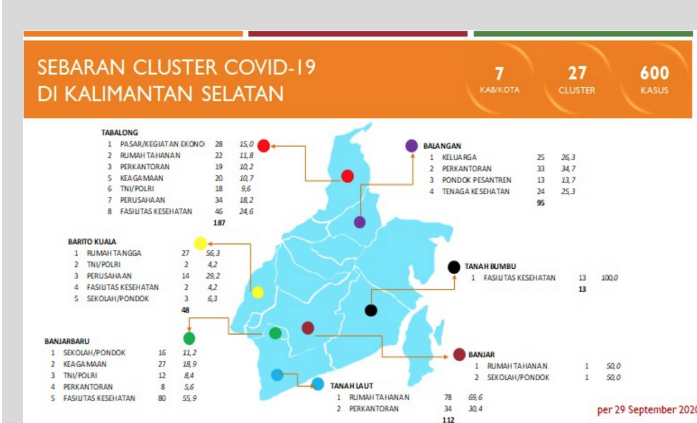
Selain melakukan tes, patuh terhadap protokol kesehatan yang berlaku juga menjadi bagian penting dalam pengendalian penyebaran Covid 19. Pada dasarnya, prinsip protokol kesehatan terdiri atas protokol perlindungan kesehatan individu dan protokol perlindungan kesehatan masyarakat (Arifin, 2020). Adapun protokol perlindungan kesehatan individu meliputi aktivitas 3M, yaitu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih; menghindari kerumunan, keramaian dan berdesakan; serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, sedangkan protokol perlindungan kesehatan masyarakat meliputi aktivitas 3M, yaitu menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, membersihkan tangan secara teratur dengan mencuci tangan

pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer, serta menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Penerapan protokol kesehatan ini dapat menurunkan transmisi Covid 19 antara 35% sampai 85%.

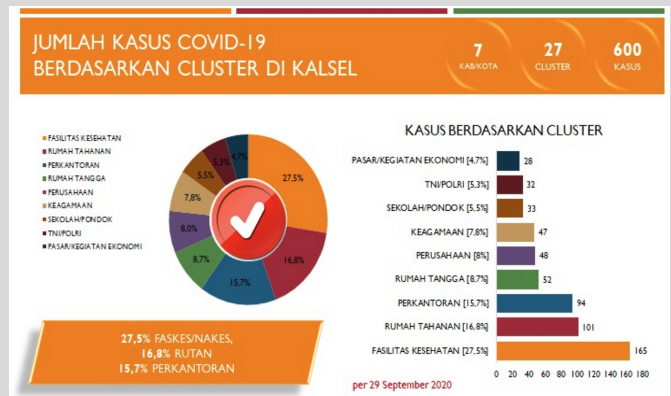
Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid 19 yang telah dilakukan oleh BPS Republik Indonesia Tahun 2020 menunjukkan bahwa semakin tinggi usia responden, semakin taat responden dalam berperilaku memenuhi himbuan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, melakukan physical distancing, dan lain-lain (Gambar 3). Hal ini dikarenakan semakin tinggi usia responden, maka semakin tinggi tingkat kekhawatiran terhadap dampak pandemi pada dirinya (BPS RI, 2020). Berdasarkan hasil survei ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan di kalangan penduduk usia muda, termasuk usia wajib sekolah dasar dan lanjutan (sekolah tinggi maupun universitas) ( $\leq 20$  tahun) cenderung rendah. Meskipun jumlah kasus Covid 19 dan persentase angka kematian Covid 19 pada usia sekolah cenderung rendah, pembukaan sekolah atau pondok pesantren telah berkontribusi sebesar 33% terhadap penyebaran Covid 19 di Provinsi Kalsel (Gambar 4, 5, 6, dan 7).



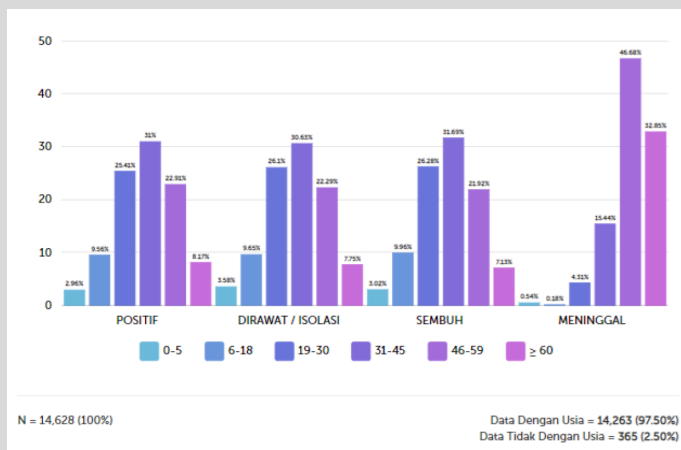
**Gambar 3.** Indeks Perilaku Ketaatan Terhadap Protokol Kesehatan Berdasarkan Usia (Sumber: BPS RI, 2020)



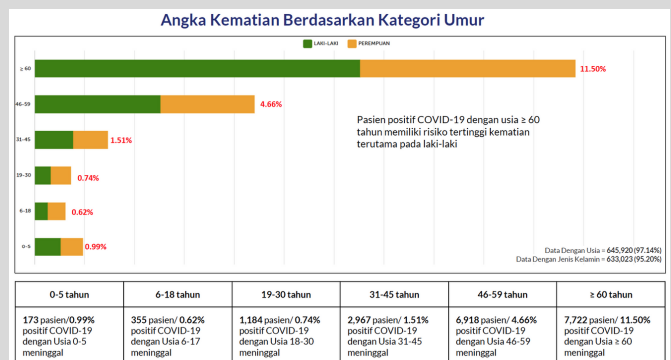
**Gambar 4.** Sebaran Kluster Covid 19 di Provinsi Kalimantan Selatan per 16 Desember 2020 (Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan)



**Gambar 5.** Jumlah Kasus Covid 19 Berdasarkan Kluster di Provinsi Kalimantan Selatan per 16 Desember 2020 (Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan)



**Gambar 6.** Jumlah Kasus Covid 19 Berdasarkan Kluster di Provinsi Kalimantan Selatan per 20 Desember 2020 (Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Indonesia)



**Gambar 7.** Persentase Angka Kematian Covid 19 Berdasarkan Kategori Umur di Indonesia per 20 Desember 2020 (Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Indonesia)

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), pemberian izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian

Agama kota/kabupaten sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya tingkat risiko penyebaran Covid 19 di wilayahnya. Akan tetapi, pada pemaparan prosedur perizinan pembelajaran tatap muka dikatakan bahwa peta zonasi risiko tidak lagi menjadi dasar pemberian izin pembelajaran tatap muka (Gambar 8). Berdasarkan hal tersebut maka menjadi sebuah pertanyaan publik tentang bagaimana cara pemerintah kota/kabupaten mempertimbangkan tingkat risiko penyebaran Covid 19 di wilayahnya jika peta zonasi risiko tidak lagi menjadi dasar

memberian izin pembelajaran tatap muka. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyati, menyatakan bahwa penyerahan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa pemetaan wilayah dan sekolah yang tepat merupakan tindakan yang kurang tepat (Wardhana, 2020).

Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, menjelaskan bahwa pembukaan sekolah pada bulan Januari 2021 bukanlah saat yang tepat dan dinilai berbahaya bagi kesehatan pelajar dan tenaga pendidik. Hal ini cukup beralasan karena pembelajaran tatap muka dilakukan tepat setelah usai libur panjang akhir tahun yang biasanya cenderung memunculkan kluster di tingkat keluarga (Herlambang, 2020). Oleh karena itu, risiko penyebaran Covid 19 di sekolah pasca libur akhir tahun perlu dievaluasi sebelum pembelajaran tatap muka dilakukan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, telah menyatakan bahwa semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, maka semakin besar dampak negatif yang terjadi pada anak, seperti ancaman putus sekolah, kendala tumbuh kembang serta tekanan psikososial dan

kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pendidikan atau proses pembelajaran di masa pandemi Covid 19. Pembukaan kembali sekolah atau pembelajaran tatap muka dapat menjadi bagian dari langkah adaptasi kebiasaan baru secara bertahap. Namun demikian, keputusan ini harus dikombinasikan dengan strategi tes, jejak dan isolasi atau yang lebih dikenal dengan 3T (testing, tracing dan treatment) dengan cakupan yang tinggi sambil menunggu vaksin yang efektif melawan Covid 19 (Panovska-Griffiths et al., 2020).

Kreativitas dan inovasi proses pembelajaran secara daring (online) yang dilakukan oleh seorang tenaga pendidik adalah kunci sukses untuk dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar serta mengurangi beban psikis peserta didiknya. Selain itu, kedisiplinan pihak sekolah dalam menyusun skema dan manajemen sistem pembelajaran daring serta membuat jadwal yang sistematis, terstruktur dan sederhana untuk memudahkan komunikasi orang tua dengan sekolah agar anak-anaknya yang belajar di rumah dapat terpantau secara efektif juga dapat



**Gambar 8.** Prosedur Perijinan Pembelajaran Tatap Muka (Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020)

membantu efektifitas pembelajaran secara daring. Kerjasama yang baik antara guru, peserta didik, orang tua, dan pihak sekolah menjadi faktor penentu agar pembelajaran daring lebih efektif dan menjadi solusi untuk memutus rantai penyebaran Covid 19 (Aini, 2020).

Dampak penutupan sekolah atau pembelajaran jarak jauh selama pandemik Covid 19 memang menjadi isu dunia. Beberapa studi melaporkan bahwa penutupan sekolah atau melakukan pembelajaran secara daring (online) selama pandemi mempunyai dampak dalam mengurangi penularan dan ukuran pandemi. Penutupan sekolah cenderung memberikan dampak positif terhadap penurunan laju penyebaran Covid 19 jika tingkat serangan dan penularannya lebih tinggi pada anak-anak dibandingkan pada orang dewasa. Meskipun jumlah kasus dan persentase angka kematian Covid 19 pada anak-anak cenderung lebih rendah dibandingkan pada orang dewasa, penutupan sekolah yang dilakukan di seluruh daratan China dan Hong Kong pada awal Tahun 2020 berkontribusi pada pengendalian Covid 19. Berdasarkan analisis menggunakan data klinis Inggris pada Tahun 1957, terkait pandemi influenza Asia, penutupan sekolah juga dapat mengurangi ukuran epidemi kurang dari 10% bila tingkat transmisinya atau nilai Rnya mirip dengan Covid 19 (yaitu, 2,5 - 3,5) (Vynnycky dan Edmunds, 2008; Viener et al., 2020).

Ketua Satgas Covid 19 Ikatan Dokter Indonesia, Prof. Zubairi Djoerban, menjelaskan bahwa risiko penularan Covid 19 lebih tinggi di sekolah, khususnya bagi anak-anak yang belum bisa secara sadar menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Beliau juga mengkhawatirkan adanya varian baru Covid 19, yang ditemukan di Inggris saat masih melaksanakan sekolah tatap muka dan menunjukkan tingkat penularan yang lebih cepat hingga 70%, dapat menempatkan anak-anak yang masuk ke sekolah dalam risiko lebih berbahaya. Adanya varian baru Covid 19 ini dikhawatirkan akan terjadi transmisi penularan dari anak ke rumah, ke orang dewasa, ke usia lanjut dan ke orang dengan komorbid. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah

daerah disarankan agar meninjau kembali kebijakan untuk membuka sekolah pada awal bulan Januari Tahun 2021. Jika terpaksa harus dibuka, maka sekolah harus melakukan monitoring yang amat sangat ketat dan disertai penyesuaian kebijakan (Anwar, 2020; Halidi dan Efendi, 2020).

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta penegakan hukum masih terus dilakukan untuk mengedukasi dan mendisiplinkan masyarakat terkait pencegahan penularan Covid 19. Oleh karena budaya dan karakteristik penduduk yang beragam, maka diperlukan suatu strategi penyampaian informasi yang tepat kepada masyarakat. Pelaku edukasi dan penegak hukum tentu tidak hanya terbatas dilakukan oleh pemerintah melalui tim KIE-nya dan juga TNI/POLRI, tetapi juga perlu peran aktif tokoh masyarakat atau publik figur yang selama ini menjadi panutan masyarakat. Di Provinsi Kalsel, sebagai salah satu daerah yang religius, peran tokoh agama sebagai komunikator atau penyampai pesan informasi terkait Covid-19 dan menjadi role model dalam menampilkan contoh perilaku patuh pada protokol pencegahan Covid-19 sangatlah diperlukan (Shadiqi, 2020). Tokoh masyarakat lain seperti Ketua Rukun Tetangga (RT) juga mempunyai peran penting dalam upaya mengedukasi, memonitoring, mengevaluasi dan mengendalikan penyebaran Covid 19 di lingkup yang lebih kecil.

### **Implementasi dan Rekomendasi**

Implementasi praktis serta rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Tetap mempertimbangkan peta zonasi risiko penyebaran Covid 19 di wilayahnya sebelum memutuskan pemberian izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada Tahun 2021;
2. Menunda sementara pembukaan sekolah dengan sistem pembelajaran tatap muka di Tahun 2021 sampai risiko penyebaran Covid 19 di wilayahnya berstatus antara rendah (zona kuning) sampai dengan tidak ada kasus (zona hijau);

3. Memberikan informasi dan bimbingan kepada orangtua terkait proses pendampingan anak selama mengikuti pembelajaran jarak jauh;
4. Jika kriteria 2 telah dipenuhi, maka pemerintah bersama satuan pendidikan wajib memberikan informasi dan bimbingan kepada orangtua terkait proses pengawasan ketat terhadap perubahan perilaku dan deteksi dini gejala Covid 19 pada anak dan keluarganya;
5. Meningkatkan capaian jumlah testing (spesimen) minimum yang telah ditetapkan oleh WHO, yaitu sebesar 1/1.000 penduduk per minggu, untuk setiap kota/kabupaten menggunakan alat ukur yang handal (reliable) dan standar sehingga secara statistik cukup bukti untuk dapat merepresentasikan kondisi penduduk (populasi) sebenarnya di wilayahnya;
6. Meningkatkan kualitas proses monitoring, evaluasi dan validasi terhadap pencatatan serta penginputan data hasil testing, tracing dan treatment, baik dari lembaga pemerintah maupun swasta, secara terintegrasi ke dalam New All Record (NAR) sehingga dapat meningkatkan transparansi dan reliabilitas data dalam menentukan peta zonasi risiko penyebaran Covid 19 dan mengambil kebijakan yang tepat pada skala lokal maupun nasional;
7. Menggunakan sistem pelacakan kontak erat berbasis teknologi sehingga diharapkan dapat mempercepat proses pengkategorian penduduk ke dalam kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, dan kasus konfirmasi erat;
8. Melakukan komunikasi dua arah yang baik antara pemerintah dengan para pelaku kegiatan ekonomi, seperti pengusaha, pedagang dan industri, agar tercipta simbiosis mutualisme dan kerja sama yang baik dalam upaya percepatan pengendalian Covid 19 tanpa menghambat perputaran roda ekonomi;
9. Penegakan hukum, ketegasan dan disiplin secara ketat, terutama di pintu-pintu utama keluar masuk penduduk di setiap kota/kabupaten, dengan melibatkan para pemuka agama dan tokoh masyarakat/publik figur setempat yang dipercaya mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mengimplementasikan standar protokol kesehatan yang berlaku dengan baik dan optimal;
10. Memberikan himbauan kepada masyarakat agar dapat membagikan informasi di media sosial yang lebih bersifat saling mendidik, memotivasi dan mengingatkan untuk tidak melakukan mobilitas yang tinggi (jika tidak mendesak) sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran bersama untuk melawan Covid 19;
11. Menghimbau para pemimpin daerah, instansi/unit, tokoh agama/masyarakat, budayawan dan publik figur untuk dapat memberikan contoh (suri tauladan) yang baik dalam menerapkan protokol kesehatan yang benar dalam berkegiatan; dan
12. Mengenali karakteristik dan budaya masyarakat lokal dalam melakukan pendekatan dan komunikasi agar mampu menyampaikan pesan edukasi, himbauan, teguran maupun peringatan secara optimal.

### **Kesimpulan**

Ketersediaan dan integrasi “real” data yang akurat, tanpa ada konflik kepentingan, merupakan faktor utama untuk dapat menjamin validitas dan reliabilitas navigasi zonasi risiko daerah. Pemerintah kota/kabupaten diharapkan tetap dapat menggunakan peta zonasi risiko daerah ini sebagai dasar pemberian izin pembelajaran tatap muka meskipun penggunaannya tidak lagi diwajibkan pemerintah pusat. Provinsi Kalsel diharapkan dapat melakukan tes RT-PCR minimal sebanyak 1/1.000 spesimen per minggu yang dilakukan secara merata di setiap kota/kabupaten agar secara statistik cukup bukti untuk dapat merepresentasikan keadaan populasi yang sebenarnya. Jika jumlah minimal tes ini tidak dapat dicapai, maka pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten harus berhati-hati dalam menginterpretasikan hasil analisis data untuk membuat keputusan maupun kebijakan terkait penanggulangan Covid 19. Tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan di kalangan penduduk usia muda, termasuk usia wajib sekolah dasar dan lanjutan (sekolah tinggi maupun universitas) ( $\leq 20$  tahun) cenderung rendah. Risiko penyebaran Covid 19 di sekolah pasca libur akhir tahun perlu dievaluasi sebelum pembelajaran tatap muka dilakukan. Kerjasama yang baik antara guru, peserta didik, orang tua, dan pihak sekolah menjadi faktor penentu agar pembelajaran daring lebih efektif dan menjadi solusi untuk memutus rantai penyebaran Covid 19. Pembukaan kembali sekolah atau pembelajaran tatap muka dapat menjadi bagian dari langkah adaptasi kebiasaan baru secara bertahap. Namun demikian, keputusan ini harus dikombinasikan dengan strategi 3T (testing, tracing dan treatment) dengan cakupan yang tinggi sambil menunggu vaksin



yang efektif melawan Covid 19. Budaya dan karakteristik penduduk yang beragam mengakibatkan perlunya suatu strategi penyampaian informasi yang tepat kepada masyarakat. Pelaku edukasi dan penegak hukum tentu tidak hanya terbatas dilakukan oleh pemerintah melalui tim KIE-nya dan juga TNI/POLRI, tetapi juga perlu peran aktif pemuka agama dan tokoh masyarakat/publik figur yang selama ini menjadi panutan masyarakat.

### Daftar Pustaka

Russell M Viner, Simon J Russell, Helen Croker, Jessica Packer, Joseph Ward, Claire Stansfield, Oliver Mytton, Chris Bonell, Robert Booy, School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review, *The Lancet Child & Adolescent Health*, Volume 4, Issue 5, 2020, Pages 397-404, ISSN 2352-4642, [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(20\)30095-X](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30095-X). (<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235246422030095X>), diakses tanggal 29 Desember 2020.

Jasmina Panovska-Griffiths, Cliff C Kerr, Robyn M Stuart, Dina Mistry, Daniel J Klein, Russell M Viner, Chris Bonell, Determining the optimal strategy for reopening schools, the impact of test and trace interventions, and the risk of occurrence of a second COVID-19 epidemic wave in the UK: a modelling study, *The Lancet Child & Adolescent Health*, Volume 4, Issue 11, 2020, Pages 817-827, ISSN 2352-4642, [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(20\)30250-9](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30250-9) (<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352464220302509>), diakses tanggal 29 Desember 2020.

Vynnycky E, Edmunds WJ. Analyses of the 1957 (Asian) influenza pandemic in the United Kingdom and the impact of school closures. *Epidemiol Infect* 2008; 136: 166-79.

Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Muhammad Abdan Shadiqi, 2020, Penguatan perilaku patuh masyarakat: keterlibatan tokoh agama di Kalimantan Selatan. Policy Brief No. 1. Tim Pakar Percepatan Penanganan Covid 19 Universitas

Lambung Mangkurat. <https://covid19.ulm.ac.id/policy-brief-penguatan-perilaku-patuh-masyarakat-keterlibatan-tokoh-agama-di-kalimantan-selatan/>, diakses tanggal 29 Desember 2020.

Syamsul Arifin, 2020, Pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam rangka menurunkan transmisi Covid-19. Policy Brief No. 2. Tim Pakar Percepatan Penanganan Covid 19 Universitas Lambung Mangkurat. <https://covid19.ulm.ac.id/pentingnya-penerapan-protokol-kesehatan-dalam-rangka-menurunkan-transmisi-covid-19-2/>, diakses tanggal 29 Desember 2020.

Hidayatullah Muttaqin, 2020, Pengendalian mobilitas penduduk mengantisipasi potensi ledakan kasus Covid-19 pasca liburan akhir tahun. Policy Brief No. 4. Tim Pakar Percepatan Penanganan Covid 19 Universitas Lambung Mangkurat. [https://covid19.ulm.ac.id/wp-content/uploads/Policy-Brief-4-Tim-Pakar-ULM\\_Hidayatullah-Muttaqin.pdf](https://covid19.ulm.ac.id/wp-content/uploads/Policy-Brief-4-Tim-Pakar-ULM_Hidayatullah-Muttaqin.pdf), diakses tanggal 29 Desember 2020.

Syamsul Arifin, 2020, Rekomendasi kebijakan penanganan covid-19 di kalimantan selatan. Policy Brief No. 3. Tim Pakar Percepatan Penanganan Covid 19 Universitas Lambung Mangkurat. [https://covid19.ulm.ac.id/wp-content/uploads/Policy-Brief-3-Tim-Pakar-ULM\\_Syamsul-Arifin.pdf](https://covid19.ulm.ac.id/wp-content/uploads/Policy-Brief-3-Tim-Pakar-ULM_Syamsul-Arifin.pdf), diakses tanggal 29 Desember 2020.

Dewi Anggraini, 2020, Optimalisasi dan proporsionalitas tes swab, Banjarmasin Post, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/08/18/optimalisasi-dan-proporsionalitas-tes-swab>, diakses tanggal 29 Desember 2020.

Anisa Nur Aini, 2020, Efektivitas pembelajaran daring (dalam jaringan) di masa pandemi Covid 19, <https://www.tribunnews.com/tribunners/2020/11/09/efektivitas-pembelajaran-daring-dalam-jaringan-di-masa-pandemi-covid-19?page=3>.

Badan Pusat Statistik, 2020, Provinsi Kalimantan Selatan dalam Angka.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2020, Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid 19.

Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Indonesia, Peta Zonasi, <https://covid19.go.id/peta-risiko>, diakses tanggal 29 Desember 2020.

Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Indonesia, Analisis Data Covid 19 Indonesia Update per 20 Desember 2020.

Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Indonesia, Penggunaan Indikator Kesehatan Masyarakat sebagai Navigasi Zonasi Risiko Daerah.

Adib Auliawan Herlambang, 2020, P2G Khawatir pembukaan sekolah Januari 2021 jadi klaster Covid-19 baru, <https://ayosemarang.com/read/2020/11/23/67486/p2g-khawatir-pembukaan-sekolah-januari-2021-jadi-klaster-covid-19-baru>, diakses tanggal 30 Desember 2020.

Seto Wardhana, 2020, Task force warns of new clusters when schools reopen, The Jakarta Post, <https://www.thejakartapost.com/paper/2020/11/25/task-force-warns-of-new-clusters-when-schools-reopen.html>, diakses tanggal 30 Desember 2020.

Firdaus Anwar, 2020, Varian Baru Corona Disebut Cepat Menular pada Anak, Ini Penjelasan Ahli, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5313307/varian-baru-corona-disebut-cepat-menular-pada-anak-ini-penjelasan-ahli>, diakses tanggal 31 Desember 2020.

Risna Halidi dan Dini Afrianti Efendi, 2020, Ada Varian Baru Virus Corona, Satgas IDI Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda, <https://www.suara.com/health/2020/12/30/105047/ada-varian-baru-virus-corona-satgas-idi-minta-sekolah-tatap-muka-ditunda>, diakses tanggal 31 Desember 2020.

Lihat seri policy brief, informasi, dan pandangan pakar di:

<https://covid19.ulm.ac.id>

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin, Indonesia, Kotak Pos 219. e-Mail: [tim@covid19.ulm.ac.id](mailto:tim@covid19.ulm.ac.id)